

# Meski WDP Pansus Aset Tidak Perlu

PONTIANAK-Rencanapembentukan Panitia Khusus Aset di DPRD Kalimantan Barat semakin sulit untuk terealisasi. Fraksi PDIP kembali menegaskan bahwa pembentukan Pansus Aset tidak urgen meskipun pemprov belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Anggota BPK, Rizal Djalil juga tidak merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menyelesaikan masalah aset.

Ketua DPRD Kalbar Minsin mengatakan, penyelesaian masalah aset di pemprov cukup melalui sebuah panitia kerja atau alat kelengkapan DPRD, misalnya melalui komisi yang membidangi aset. Komisi tersebut dapat melakukan rapat-rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah untuk penyelesaiannya.

"Berkaitan dengan aset, kita juga mendorong agar masalah ini diselesaikan. Tetapi tidak perlu dengan Pansus.

• ke halaman 15 kolom 2

Pontianak Post • Jumat 6 Juli 2012

## Meski WDP Pansus Aset Tidak Perlu

Sambungan dari halaman 9

Pansus itu terkesan terlalu bermuatan politis," katanya saat ditemui usai Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di DPRD, kemarin.

Dalam LHP tersebut, BPK memang menyoroti tentang masalah aset di pemprov sehingga tahun ini opini yang diraih pemprov masih sama dengan tahun lalu yaitu wajar dengan pengecualian. Cita-cita untuk meraih WTP masih belum tercapai.

Minsin menilai, isi laporan yang disampaikan oleh BPK itu didasari oleh sebuah pemeriksaan yang objektif. Masalah aset menurutnya memang sudah menjadi persoalan yang muncul sejak tahun lalu. DPRD sebelumnya juga sudah pernah meminta agar sekretaris daerah segera menuntaskannya.

Di samping masalah aset, dalam LHP itu, ia melihat BPK juga mengungkapkan berbagai kemajuan yang sudah diraih pemprov. Salah satunya adalah peningkatan volume APBD dari tahun sebelumnya Rp1,8 triliun menjadi Rp2,1 triliun. "Itu prestasi yang luar biasa. Kita di DPRD juga merasa sebagai bagian dari prestasi tersebut," ujarnya.

Upaya penyelesaian aset dinilai tidak harus dengan Pansus. Apalagi jika mengingat pembentukan Pansus tersebut akan menyedot dana yang cukup besar. Satu Pansus beranggotakan sekitar 22-23 Anggota DPRD. Untuk satu kali konsultasi Pansus ke Jakarta, dibutuhkan dana sekitar Rp200 juta. Sedangkan untuk studi banding, dana minimal yang perlu dikeluarkan mencapai kira-kira Rp300 juta.

"Berarti satu Pansus itu perlu setengah miliar. Ini yang berat. Kita ingin menghemat uang negara," katanya. Akan lebih baik apabila dana itu dialihkan untuk keperluan lain yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat, misalnya untuk membantu kabupaten/kota, membantu pembangunan rumah sakit atau sekolah.

Lantas, apakah paripurna penyampaian usul pembentukan Pansus yang beberapa waktu lalu sempat tertunda tidak akan diagendakan kembali? Minsin mengatakan, masalah ini akan dibicarakan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD. Selain itu, masalah ini juga akan dibahas terlebih dahulu di dalam rapat pimpinan. "Paling lambat pekan depan kita sudah rapat," ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP, M Kebing menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan biaya yang mungkin akan tersedot untuk keperluan Pansus. Jika Pansus memang penting untuk dibentuk, menurutnya dana itu akan dapat dianggarkan melalui APBD. Permasalahannya, ada hal mendasar lain yang dinilai patut untuk diingat yaitu aturan tata tertib mengenai pembentukan Pansus.

Fraksi PDIP beranggapan bahwa dengan opini WDP, pemprov sudah cukup berhasil. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh anggota Fraksi PDIP, M Jimi dan Krisantus. Krisantus mengatakan, aset-aset yang dipersoalkan oleh BPK bukanlah aset fiktif. Aset tersebut ada dan yang menjadi masalah hanya aspek administrasi, menyangkut standar akuntansi pemerintahan.

"Ada tanah yang tidak bersertifikat. Jadi, urusan ini sebetulnya gampang, tidak perlu pakai Pansus," kata Krisantus. Saat ditanya mengenai usul pembentukan Pansus yang disampaikan oleh 21 anggota DPRD, Fraksi PDIP menilai itu sah-sah saja karena setiap anggota DPRD memang berhak untuk menyampaikan usul. Namun, fraksi ini tetap menyatakan tidak setuju Pansus Aset. (ron)